

SKRIPSI

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA MAKASSAR DALAM
PROGRAM KONTAINER RECOVER CENTER PADA KEBIJAKAN
MAKASSAR RECOVER
(Studi Kasus di Kecamatan Mamajang Kota Makassar)**

SUKMAWATI AYU ANDIRAH

E011181515



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2022



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

ABSTRAK

Sukmawati Ayu Andirah (E011181515). Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar di dalam Program Kontainer Recover Center pada Kebijakan Makassar Recover (Studi Kasus: Kecamatan Mamajang Kota Makassar) Tahun 2022. XVI + 86 Halaman + 2 Gambar + 4 Tabel + 48 Daftar Pustaka + Lampiran + Dibimbing Oleh Dr.Gita Susanti, M.Si dan Amril Hans, S.AP, MPA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Dalam Program Kointainer Recover Center Dalam Kebijakan Makassar Recover (Studi Kasus di Kecamatan Mamajang Kota Makassar).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang dimana data primer diperoleh dari wawancara kepada informan dan observasi dilapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data yang berkaitan dengan Kontainer Recover Center. Penelitian ini menggunakan teori dari Burns, Hambleton dan Hogget dengan mengelompokkan 3 anak tangga yang terdiri dari 12 anak tangga yaitu: - Non Partisipasi warga (citizen non-participation) : 1. Penipuan warga, 2. Konsultasi sinis, 3. Informan yang buruk, 4. Pemeliharaan pelanggan; - Partisipasi warga (citizen participation): 5. Konsultasi yang bermutu, 6. Konsultasi sejati, 7. Badan penasihat yang efektif, 8. Desentralisasi dalam pembuatan keputusan, 9. Kemitraan, 10. Kendali yang dideglasikan; - Kendali Warga: 11. Kontrol yang dipercayakan, 12. Kontrol interdependensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar dalam Program Kontainer Recover Center pada Kebijakan Makassar Recover di Kecamatan Mamajang dapat dikatakan masih kurang hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintahan yang turun secara langsung kepada masyarakat terkait Kontainer Recover Center, baik informasi kegunaan, tujuan dan fungsinya. Program yang dibuat oleh pemerintah ini tidak menunjukkan bahwa sukses dengan keberhasilan yang di peruntukkan oleh masyarakat setempat. Dalam derajat partisipasi masyarakat (di atas derajat tidak ada partisipasi dan dibawah derajat kendali warga), berarti masyarakat pada dasarnya dapat memengaruhi hasil kebijakan yang sedang di proses oleh penyelenggara pemerintahan daerah. Akan tetapi, masyarakat tidak dapat memengaruhi desain pokok dari kebijakan pembangunan dan pelayanan publik daerah.

Kata Kunci : *Partisipasi, Masyarakat, Kontainer Recover Center.*



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

ABSTRACT

Sukmawati Ayu Andirah (E011181515). The Level of Makassar City Community Participation in the Kontainer Recover Center Program on the Makassar Recover Policy (Case Study in Mamajang District, Makassar City) in 2022. XVI + 86 Pages + 2 Figures + 4 Tables + 48 Bibliography + Attachments + Supervised by Dr.Gita Susanti , M.Si and Amril Hans, S.AP, MPA.

This study aims to determine the level of community participation in Makassar City in the Kontainer Recover Center Program in the Makassar Recover Policy (Case Study in Mamajang District, Makassar City).

This research is a descriptive qualitative study with the data used are primary and secondary data where primary data is obtained from interviews with informants and field observations, while secondary data is obtained from data related to the Kontainer Recover Center. This study uses the theory of Burns, Hambleton and Hogget by grouping 3 stairs consisting of 12 steps, namely: - Non-citizen participation (citizen non-participation): 1. Citizen fraud, 2. Cynical consultation, 3. Bad informants, 4. Customer maintenance; - Citizen participation: 5. Quality consultation, 6. Genuine consultation, 7. Effective advisory body, 8. Decentralization in decision making, 9. Partnership, 10. Delegated control; - Citizen Control: 11. Entrusted control, 12. Interdependence control.

The results show that the Makassar City Community Participation Level in the Kontainer Recover Center Program in the Makassar Recover Policy in Mamajang District can be said to be still lacking this is due to the lack of socialization from the government that goes directly to the community regarding the Kontainer Recover Center, both information on its uses, objectives and functions. . This program created by the government does not show that it is successful with the success intended by the local community. In terms of the degree of community participation (above the degree of no participation and below the degree of citizen control), it means that the community can basically influence the results of policies that are being processed by local government administrators. However, the community cannot influence the basic design of development policies and local public services.

Keywords: *Participation, Society, Kontainer Recover Center.*



UNIVERSITAS HASANUDDIN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukmawati Ayu Andirah
NIM : E011181515
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar di dalam Program Kontainer Recover Center pada Kebijakan Makassar Recover (Studi Kasus di Kecamatan Mamajang Kota Makassar)". Adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 23 November 2022

Yang menyatakan,



Sukmawati Ayu Andirah



UNIVERSITAS HASANUDDIN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sukmawati Ayu Andirah
NIM : E011181515
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar di dalam Program Kontainer Recover Centre pada Kebijakan Makassar Recover (Studi Kasus di Kecamatan Mamajang Kota Makassar)

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan layak untuk Ujian Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 23 November 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Gita Susanti, M.Si

NIP. 19650311 199103 2 001

Pembimbing II

Amril Hans, S.AP, MPA.

NIP. 19620706 202204 3 001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,



Dr. Nurdin Nara, M.Si

NIP. 19630903 198903 1 002



UNIVERSITAS HASANUDDIN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sukmawati Ayu Andirah
NIM : E011181515
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar di dalam Program Kontainer Recover Center pada Kebijakan Makassar Recover (Studi Kasus di Kecamatan Mamajang Kota Makassar)

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Skripsi Program Sarjana, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 23 November 2022

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Dr. Gita Susanti, M.Si
Sekretaris Sidang : Amril Hans, S.AP, MPA
Anggota : 1. Dr. Syahribulan, M.Si.
2. Drs. Nelman, M.Si.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah Hirabbil 'Alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar dalam Program Kontainer Recover Center pada Kebijakan Makassar Recover (Studi kasus di Kecamatan Mamajang Kota Makassar) . Skripsi ini dibuat dan diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S.A.P pada Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, manusia yang telah dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yaitu junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, serta para sahabatnya yang dimuliakan Allah SWT.

Tidak dapat disangkal bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan cobaan yang dihadapi serta usaha yang keras dalam menyelesaikannya. Namun, melalui kesempatan ini dengan segala rasa syukur penulis ucapkan terima kasih kepada kedua Orang Tua dan Wali Orang tua penulis **Muh. Fahrul (Ayah)** dan **Hj. Sulfia (Ibu)** serta **H. Azis (Kakek)** dan **Hj. Norma (Nenek)** yang telah banyak membantu dan mendukung baik secara moril dan materil serta motivasi dan doa yang selama ini beliau panjatkan kepada Allah SWT buat penulis. Terima kasih atas pengorbanan disetiap tetes

keringat, air mata dan kasih sayangnya yang senantiasa diberikan kepada penulis dari kecil sampai sekarang sehingga penulis dapat berada pada titik ini. Terkhusus untuk ibu yang sangat penulis cintai dan sayangi terima kasih telah selalu ada menemani disetiap kondisi baik bahagia maupun terpuruk. Penulis sungguh merasa bersyukur memilikimu sebagai Bapak dan Ibu yang sangat hebat untukku. Terima kasih juga kepada adik saya **Muh. Rifky Abdullah** yang sangat saya sayangi dan kasahi. Semoga Bapak, Ibu, dan kedua saudara penulis dirahmati oleh Allah SWT, aamiin.

Dengan segala kerendahan hati dan limpahan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu **Dr. Gita Susanti, M.Si** dan Bapak **Amril Hans, S.AP, MPA** selaku dosen pembimbing 1 (satu) dan dua (2) yang telah meluangkan waktunya memberikan ilmu, masukan, arahan, maupun dorongan yang sangat berarti sejak awal studi sampai persiapan serta terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini juga tidak akan berhasil tanpa bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong skripsi ini sehingga dapat terselesaikan. Dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas HASanuddin dan staf.
2. Bapak **Dr. Phil Sukri, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

3. Bapak **Dr. Nurdin Nara, M.Si.** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, M.AP.** selaku sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
5. Ibu **Dr. Gita Susanti, M.Si.** selaku pembimbing I dan Bapak **Amril Hans, S.AP, MPA.** selaku dosen penasehat akademik sekaligus pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan serta meuangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan skripsi ini.
6. Ibu **Dr. Syahribulan, M.Si.** dan Bapak **Drs. Nelman, M.Si.** selaku dewan penguji dalam ujian skripsi ini. Terima kasih atas kritik, saran, masukannya yang sangat membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. Para **Dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 4 (empat) tahun perkuliahan.
8. Seluruh **Staff Departemen Ilmu Administrasi** (Ibu Rosmina, Ibu Darma, Pak Lili, DII) dan **Staff di lingkup FISIP Unhas tanpa terkecuali.** Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
9. Terima kasih kepada **Kepala Kecamatan Mamajang Kota Makassar** dan **Kepala Kelurahan Mamajang Dalam Kota Makassar** serta **Masyarakat** , atas bantuan, informasi, dan waktu yang diberikan sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.

10. Segenap Keluarga Besar **HUMANIS FISIP UNHAS** terimakasih atas pengalaman, kekeluargaan, serta kebersamaan yang tak terlupakan yang telah diberikan selama ini.
11. Terima kasih kepada **FILANOIS (Fira, Ihza, Lala, Andirah, Niza, Opi, Inayah, Shiva)** yang telah menjadi teman serta sahabat pertama di Departemen Ilmu Administrasi Publik tanpa bantuan kalian penulis tidak dapat menjalani masa perkuliahan yang penuh dengan drama ini. Tanpa Kalian masa perkuliahan akan terasa Flat.
12. Terima kasih kepada **Azis Family (Keluarga Besar)** yang telah menjadi keluarga yang hangat untuk penulis serta support penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini, tetap kompak dan Berlambe turah untuk cari informasi.
13. Terima Kasih Kepada **Anak Hilang (Kiki, Mj, Erika, Arum, Widy, Aisa)** yang telah menemani penulis semenjak SMA sampai saat ini serta dapat menjadi teman, sahabat, keluarga yang ada disetiap suka maupun duka, terimakasih atas segalanya tetap terapkan sifat pakbal dan ngegas . Terkhusus untuk Erika yang menemani setiap harinya penulis dan menjadi Sister satu – satunya, I love u till jannah.
14. Terima kasih kepada teman seperjuangan **LENTERA'18** yang merupakan keluarga pertama di bangku perkuliahan ini. Terima kasih atas momen-momen kebersamaannya dan bantuan yang tak terhingga selama penulis menempuh status sebagai mahasiswa. Semoga apa yang telah di cita-citakan dapat tewujud dan sampai jumpa di lain waktu.
15. Terima kasih kepada **Partner Sedari SMA (Rizky JP)** yang menemani penulis dari SMA hingga Waktu yang tak di tentukan, yang menemani

penulis setiap harinya nonkrong, Brainstorming, dan melewati suka duka selama bertahun tahun.

16. Terima kasih kepada **Geng Macan (Pute, Nadila, Ovi)** yang siap mendengarkan keluh kesah penulis setiap harinya, yang selalu siapkan penulis makanan dan minuman. I lubh u
17. Terima kasih kepada **Mandala Group (Kak kiki, Kak Ince)** yang mengerti kepada penulis dari KKN hingga penyusunan skripsi Rela jika penulis cuti dan off kerja demi menyelesaikan masa perkuliahan, tetap lawak dan happy kiyowo.
18. Untuk teman-teman **KKN Gel 106 Mamajang**, terima kasih untuk kebersamaan yang singkat namun berarti. Terkhusus **(Aqila, Nisya, Farah, Fira, Ainul, Sekar, Idar)** yang tetap berkomunikasi hingga saat ini. Mamajang yo yo yo.
19. Kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih semuanya.
20. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, terima kasih karena sudah merasakan pahitnya dunia dari kecil hingga dewasa, terimakasih walaupun terpuruk tetap mau bangkit kembali untuk masa depan yang cerah, terimakasih untuk tidak egois kepada diri sendiri karena mau kuliah sambil bekerja, terimakasih sudah mau berdamai sama diri sendiri walaupun di hantam dengan kerasnya ujian hidup yang selalu di jalani .

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan

kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	3
I.3 Tujuan Penelitian.....	4
I.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
II.1 Konsep Partisipasi Masyarakat.....	5
II.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	6
II.1.2 Bentuk – bentuk Partisipasi masyarakat.....	8
II.1.3 Fungsi dan Manfaat Partisipasi Masyarakat.....	12
II.1.4 Hubungan Partisipasi dan Administrasi.....	13
II.1.5 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	14
II.1.6 Hambatan dan Kendala Partisipasi Masyarakat.....	16
II.2 Konsep Pembangunan.....	18
II.2.1 Pengertian Pembangunan Daerah.....	18
II.2.2 Pentingnya Partisipasi dalam Pembangunan Daerah.....	22
II.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Daerah.....	23

II.3 Penelitian Terdahulu	29
II.4 Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
III.1 Pendekatan Penelitian	37
III.2 Tipe Penelitian	38
III.3 Lokasi Penelitian	38
III.4 Unit Analisis	39
III.5 Informan Penelitian	39
III.6 Sumber Data	40
III.7 Fokus Penelitian.....	40
III.8 Teknik Pengumpulan Data	44
III.9 Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
IV.1 Gambaran Umum Kota Makassar	47
IV.1.1 Kondisi Geografis dan Keadaan Penduduk.....	48
IV.1.2 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	49
IV.2 Profil Kontainer Recover Center	50
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	55
V.1 Hasil Penelitian	55
V.1.1 Non Partisipasi Warga (Citizen non-participation)	55
V.1.2 Partisipasi Warga (Citizen Participation)	64
V.1.3 Kendali Warga (Citizen Control)	70
BAB VI PENUTUP	75
VI.1 Kesimpulan	75
V.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir.....	36
Gambar V.1 Titik Kontainer Recover Center.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Makassar Tahun 2020	48
Tabel IV. 2 Statistik Pemerintahan Kota Makassar Tahun 2018-2020	49
Tabel V.1 Data Partisipasi Masyarakat Kecamatan Mamajang Dalam Program Kontainer Recover Center	69

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan menularnya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease (COVID-19). Diketahui, bahwa asal mula virus ini berawal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus ini. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Pada bulan Maret 2021 Pemerintah Kota Makassar meluncurkan sebuah kebijakan baru sebagai inovasi baru penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). ditetapkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 bahwa sehubungan dengan upaya pencegahan dan penurunan penyebaran Corona Virus disease 2019 (COVID-19) Sebagaimana dalam Visi dan Misi Walikota Makassar Tahun 2021-2026, maka perlu di atur dalam suatu kebijakan tentang *Makassar Recover* .di dalam Perwali Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273). Kebijakan baru itu diberi nama Recover atau singkatan dari Smart Emergency Protokol Againsts Covid-19

and Services. Makassar Recover ada tiga sub program yang akan di jalankan melalui berbagai tahap penguatan imunitas, adaptasi sosial dan pemulihan ekonomi. Makassar Recover Penguraiannya terbagi 3 yaitu satgas detector, satgas raika, dan covid hunter. di dalam kebijakan Makassar Recover terdapat beberapa kebijakan di dalamnya, salah satunya Kontainer Recover Center yang akan menjadi pusat pelayanan covid-19 di tingkat kelurahan, mulai dari vaksinasi, pemeriksaan GeNose dan lain nya yang berkaitan dengan proses Tracing, testing dan treatment . di mana Masyarakat ikut berpartisipasi untuk membantu pemerintah untuk menyukseskan Program ini .maka dari itu Bentuk partisipasi masyarakat dalam program Kontainer Recover Center di dalam kebijakan Makassar Recover ini mulai bermunculan dalam menghadapi Covid-19 dari berbagai lapisan warga masyarakat. Penelitian bertujuan mengkaji bagaimana keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat Kota Makassar dalam program Kontainer Recover Center di dalam kebijakan Makassar Recover di Kecamatan Mamajang.

Keberhasilan dari kebijakan atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam Program Kontainer Recover Center, pada Kebijakan Makassar Recover ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat di beberapa kelurahan di kecamatan mamajang. Berbagai kebijakan dan program yang telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka pencegahan virus ini, akan tetapi berdasarkan hasil observasi saya di kecamatan mamajang masih terdapat masyarakat yang kurang mengetahui keberadaan dan dari kontainer recover center tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait fungsi Kontainer Recover Center, dapat dikatakan masih lemah karena kurangnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk itu Pentingnya kolaborasi satu sama lain antara pemerintah dan masyarakat untuk keberhasilan dari setiap program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah jadi bukan hanya pemerintah saja yang bergerak menghimbau serta memberikan edukasi melainkan masyarakat juga harus berpartisipasi didalamnya dengan cara menjalankan setiap program yang ada dalam kebijakan Makassar Recover dan lebih lagi memperhatikan, mengingatkan satu sama lain agar bersama sama dapat menyukseskan program Kontainer Recover Center pada kebijakan Makassar Recover ini. Permasalahan-permasalahan diatas menunjukan pada kurangnya partisipasi masyarakat Kota Makassar dalam Program Kontainer Recover Center pada kebijakan Makassar Recover sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Penjelasan di atas Peneliti tertarik untuk meneliti Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Program Makassar Recover dengan Judul **“Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Dalam Program Kontainer Recover Center Dalam Kebijakan Makassar Recover (Studi Kasus di Kecamatan Mamajang Kota Makassar) “**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka dalam penelitian ini diajukan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yaitu “Bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar dalam program Kontainer Recover Center dalam Kebijakan Makassar Recover (Studi Kasus di Kecamatan Mamajang Kota Makassar)? “.

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian yaitu untuk mengetahui “Bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar dalam program Kontainer Recover Center dalam Kebijakan Makassar Recover (Studi Kasus di Kecamatan Mamajang Kota Makassar)?”.

I.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap manfaat yang akan di dapatkan dapat di jadikan sebagai bahan pembelajaran khususnya pembelajaran untuk pribadi penulis dan secara umum masyarakat luas, dalam hal ini insan akademik dan pemangku kebijakan dalam pemerintahan daerah secara umum. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar dalam program Kontainer Recover Center pada Kebijakan Makassar Recover dan Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dapat di jadikan masukan yang bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran serta informasi kepada pihak yang terkait khususnya untuk masyarakat Kota Makassar Kecamatan Mamajang mengenai Kontainer Recover Center pada kebijakan Makassar Recover.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Partisipasi Masyarakat

II.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Arti penting partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dikemukakan oleh banyak ahli, seperti Almond dan Verba yang membedakan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan pusat dan daerah Gabriel A. Almond dan Sidney Yerba (1984:4) .Pakar lainnya seperti Sherry R. Arnstein (1971) juga mengemukakan arti penting partisipasi masyarakat serta kebutuhan untuk mengukur kadar partisipasi tersebut melalui *ladder of citizen participation*. Dalam administrasi pembangunan, David. C. Korten (1988) menyatakan betapa pentingnya partisipasi dalam berbagai proses pembangunan sehingga pembangunan dapat dijalankan untuk meningkatkan martabat manusia sebagaimana tertuang dalam gagasan dasarnya *people centered development*. Selain itu adapun pendapat menurut Burns, Hambleton, & Hogget (1994) yang menunjukkan pentingnya partisipasi sebagai strategi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat (*voice*) dalam proses pemerintahan daerah.

Mengenai kandungan apa yang tercakup dalam istilah partisipasi. Rahnema memulai pembahasannya mengenai partisipasi sebagai " the action or fact of partaking having or forming a part of".Majid Rahnema (1992:116). Dalam pengertian ini, partisipasi dapat bersifat transitif (berorientasi pada tujuan tertentu) sedangkan intransitive (apabila subjek tertentu berperan serta tanpa tujuan yang jelas), dapat pula bermoral

(tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan etika/ mengandung konotasi positif) sedangkan tak bermoral (kegiatan berpartisipasi ditujukan pada hal yang tidak sesuai dengan etika). Kandungan pengertian tersebut juga dapat bersifat dipaksa atau bebas dan dapat pula bersifat manipulatif maupun spontan.

Akhirnya, partisipasi Juga dapat dibedakan apakah bersifat manipulatif atau spontan. Partisipasi yang dimanipulasi mengandung pengertian bahwa partisipan tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, namun sesungguhnya partisipan diarahkan untuk berperan serta oleh kekuatan di luar kendalinya. Sementara itu Midgley (1986:27) menjelaskan partisipasi spontan sebagai "a Voluntary and autonomous action on the part of the people to organize and deal with their problems unaided by government or other external Agents".

Pengertian partisipasi yang diacu oleh Rahnema (1992) tersebut tentu masih terlalu umum sehingga diperlukan definisi yang lebih jelas dan khusus bagi studi administrasi publik. Bryant and White (1987: 268-276) telah menggambarkan pengertian partisipasi yang lebih mendalam pada bidang administrasi pembangunan sebagai partisipasi oleh masyarakat atau oleh penerima manfaat proyek dalam pembuatan rancangan dan pelaksanaan proyek. Semula partisipasi hanya didefinisikan secara politis sepenuhnya sebagaimana yang berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an. Dalam hal ini, partisipasi diartikan sebagai pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dalam perkumpulan sukarela gerakan protes, dan sebagainya. Partisipasi politis ini dapat dibagi dalam dua arena. Pertama, partisipasi horizontal yang melibatkan masyarakat secara kolektif

untuk memengaruhi keputusan kebijakan. Kedua, karena vertikal yang terjadi ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Sementara itu, Midgley (1986:26-27) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat berkonotasi the direct involvement of ordinary people in local affarrs. Partisipasi masyarakat berarti adanya keterlibatan masyarakat biasa dalam urusan-urusan setempat secara langsung. Midgley memperjelas pengertian partisipasi masyarakat ini dengan mengacu pada salah satu definisi yang termuat dalam resolusi PBB pada awal tahun 1970-an sebagai berikut. "The creation of opportunities to enable all members of a community and the larger society to actively contribute to and influence the development process and to share equitably in the fruits of development". (Penciptaan peluang yang memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan dan mempengaruhinya serta menikmati manfaat pembangunan tersebut secara merata). Mengenai batasan apa yang tercakup dalam partisipasi masyarakat Midgley mengungkapkan adanya dua pandangan. Pertama berdasarkan United Nations Economic and Social Council Resolution 1929. Resolusi ini menyatakan bahwa partisipasi membutuhkan keterlibatan orang-orang secara suka rela dan demokratis dalam hal :

- a) Sumbangsihnya terhadap usaha pembangunan,
- b) Penerimaan manfaat secara merata, dan.
- c) Pengambilan keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan, serta penerapan program pembangunan sosial dan ekonomi.

II.1.2 Bentuk – Bentuk Partisipasi

Cohen dan Uphoff (1977:2) yang membedakan partisipasi atas empat jenis berdasarkan sistem dan mekanisme partisipasi, antara lain:

- a. *Participation in Decision Making* adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat.
- b. *Participation in Implementation* adalah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian-sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang.
- c. *Participation in Benefit* adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan.
- d. *Participation in Evaluation* adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta

hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya, memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

Burns, Hambleton dan Hogget (dalam Muluk, 2007:61-64) kemudian mengembangkan teori partisipasi publik yang lebih besar sesuai dengan analisis pemerintahan daerah. Teori tersebut dinamakan “ladder of citizen empowerment” (tangga pemberdayaan masyarakat). Beberapa pemikiran yang melatar belakangi teori yang dikemukakan tersebut. Pertama, konsep yang dikemukakan oleh Hirschman pada tahun 1970 dimana strategi pemberdayaan terdiri atas dua pilihan, yaitu exit dan voice. Kedua, pemikiran yang melatar belakangi adalah perbedaan antara konsep pilihan, partisipasi dan kendali. Pemikiran ketiga adalah ruang lingkup kekuasaan warga.

Partisipasi warga dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahan daerah dibedakan dalam tiga wilayah pengambilan keputusan, yaitu praktek operasional, keputusan anggaran, dan pembuatan kebijakan. Analisis yang dilakukan Burns, Hambleton dan Hogget dengan berdasarkan pada beberapa pemikiran yang melatar belakangi teori ladder of citizen empowerment maka diperoleh tiga derajat partisipasi masyarakat dan dua belas anak tangga. Masing-masing derajat partisipasi dibagi dalam beberapa anak tangga yang jaraknya tidak sama pada masing-masing derajat. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, tidak terlepas dari Teori Pilihan Publik (Public Choice).

Seperti halnya Arnstein, Burns, Hambleton & Hogget (dalam Muluk, 2007:61-64) juga mengelompokkan tiga anak tangga yang terdiri dari dua belas anak tangga, yaitu :

- Non partisipasi warga (*citizen non-participation*) ditandai dengan adanya manipulasi informasi dan kesan yang sering kali terjadi dalam kehidupan publik. Derajat partisipasi ini terdiri dari empat anak tangga, yaitu

1. Penipuan warga, Penipuan warga sering kali dilakukan dengan mendistorsi informasi, menutupi apa yang sebenarnya terjadi, dan selalu terjadi komunikasi satu arah.
2. Konsultasi sinis, konsultasi sinis sering kali dilakukan dengan memperlakukan partisipasi sekadar sebagai permainan.
3. Informasi yang buruk, informasi buruk yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kualitas informasi yang buruk ini dapat saja disengaja untuk menghambat partisipasi namun dapat pula tidak disengaja.
4. Pemeliharaan pelanggan, Pemeliharaan pelanggan berfungsi utama untuk mengatasi kemarahan warga atas keluhan pelayanan yang diterima

- Partisipasi warga (*citizen participation*) dalam derajat partisipasi ini, warga memiliki kuasa untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemerintahan daerah. Derajat partisipasi ini terdiri dari enam anak tangga

5. Konsultasi yang bermutu, pengembangan bahasa, metode, kepercayaan dan asumsi yang di mengerti rakyat

6. Konsultasi sejati, melibatkan warga dalam memengaruhi pengambilan keputusan.
 7. Badan penasihat yang efektif, Dalam hal ini, anggota DPRD berfungsi sebagai katalis dengan mendorong warga agar menyampaikan aspirasinya
 8. Desentralisasi dalam pembuatan keputusan, desentralisasi terbatas dalam pengambilan keputusan mengandung adanya pengaruh warganya dalam proses pengambilan keputusan
 9. Kemitraan, kemitraan yang berarti pemerintah daerah memberikan kekuasaan yang lebih berarti pada tingkatan masyarakat.
 10. Kendali yang di delegasikan, Organisasi lokal baik berupa asosiasi atau koperasi yang mengelola suatu urusan tertentu maupun pemerintahan berbasis ketetanggaan (seperti desa) dapat menjalankan pengelolaan suatu urusan atau wilayah tertentu setelah didelegasikan oleh pemerintah daerah
- Kendali Warga (*citizen control*) , warga memiliki kekuasaan untuk memerintah suatu program,wilayah atau lembaga tertentu dengan derajat kemandirian pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mendelegasikan kekuasaan pada urusan tertentu kepada organisasi tertentu dengan dasar kontrak hukum. Terdapat dua anak tangga dalam derajat ini.
11. kontrol yang dipercayakan,Kontrol yang dipercayakan, pemerintah daerah dapat mempercayakan pengelolaan suatu urusan kepada suatu organisasi baik melalui hubungan

bantuan keuangan maupun melalui pengembangan berbagai bentuk hubungan dan kontrak pembantuan yang bersifat lebih informal.

12. Kontrol Interdependensi Derajat demokrasi yang lebih besar dikembangkan dengan membentuk badan otoritas demokratis yang menangani satu urusan tertentu (misalnya kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.)

II.1.3 Fungsi dan Manfaat Partisipasi

Arti penting partisipasi pada intinya terletak pada fungsinya.

Fungsi pertama. adalah sebagai sarana swaeducasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik. Dalam fungsi ini, partisipasi masyarakat tidak akan mengancam stabilitas politik dan seyogyanya berjalan di semua jenjang pemerintahan. Fungsi lain dari partisipasi. adalah sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan.

Pemerintah daerah sering kali meminta warga untuk berpartisipasi, namun partisipasi yang diselenggarakan berfungsi sekadar sebagai formalitas karena pemerintah daerah tidak sepenuhnya menghendaki keterlibatan warga dalam aktivitas pemerintahan yang berarti. Partisipasi dijalankan hanya pada hal-hal yang sepele.

Menurut Carter (dalam Santoso, 2005:2), menyebutkan bahwa fungsi dari partisipasi masyarakat adalah :

- a) Partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan
- b) Partisipasi masyarakat sebagai strategi

- c) Partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi
- d) Partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa
- e) Partisipasi masyarakat sebagai terapi.

Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat adalah :

- a) Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab
- b) Meningkatkan proses belajar
- c) Meneliminir perasaan terasing
- d) Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah
- e) Menciptakan kesadaran politik
- f) Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- g) Menjadi sumber dari informasi yang berguna merupakan komitmen sistem demokrasi.

II.1.4 Hubungan Partisipasi dengan Administrasi

Denhardt & Denhardt mengungkapkan adanya perspektif new public service yang menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat ini dalam administrasi publik. Pada intinya, perspektif ini merupakan "*a set of idea about the role of public administration in the governance system that place public service, democratic governance, and civic engagement at the center.*" Dengan mempertimbangkan bahwa pemilik kepentingan publik yang sebenarnya adalah masyarakat, administrator publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab dalam melayani dan memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organisasi publik dan implementasi kebijakan publik. Perubahan orientasi tentang posisi warga

negara, nilai yang dikedepankan, dan peran pemerintah ini memunculkan perspektif baru administrasi publik yang disebut *new public service*.

II.1.5 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Dari literatur didapatkan bahwa umumnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal.

- a. Faktor internal yaitu mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, yaitu umur, jenis kelamin, status dalam keluarga, tingkat pendidikan, etnis, agama, bahasa, pekerjaan, tingkat pendapatan, jarak rumah dengan lokasi pekerjaan atau aktivitas dan kepemilikan tanah (Cohen, J. and Uphoff, 1977:6).
- b. Faktor eksternal adalah semua pihak luar yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program tersebut, antara lain pengurus Desa, tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah, Non Governmental Organization, pihak ketiga (LSM, Yayasan sosial, Perguruan Tinggi), Sunarti (2003:9).

Waktu luang seseorang untuk terlibat dalam organisasi atau kegiatan di masyarakat juga dipengaruhi jenis pekerjaannya, banyak warga yang telah disibukkan oleh pekerjaan utama atau kegiatannya sehari – hari kurang tertarik untuk mengikuti pertemuan, diskusi atau seminar (Budiharjo & Sujarto, 2009) Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa faktor internal meliputi kemauan berupa sikap dan motivasi serta kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh individu. Sedangkan faktor eksternal berupa kesempatan yang mendorong

individu untuk ikut berpartisipasi dalam program, berupa pemberian akses (Lokita, 2011) dan (Mardikanto & Soebiato, 2013).

Slamet (2003) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kejadian nyata apabila terpenuhi faktor-faktor yang mendukungnya, yaitu

- a) adanya kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi;
- b) adanya kemauan, yaitu adanya sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut; dan
- c) adanya kemampuan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, bisa berupa pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya. Kemauan dan kemampuan merupakan potensi yang dimiliki oleh pelaku secara individu ataupun kelompok. Sedangkan kesempatan lebih dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan di luar diri pelaku. Selain itu, tingkat penguasaan informasi mengenai program merupakan faktor yang dapat menimbulkan kemauan seseorang untuk berpartisipasi (Lugiarti, 2004)

Tjokroamidjojo (1995: 226) mengatakan ada 3 elemen yang menjadi perhatian dalam partisipasi pembangunan, yaitu :

1. Kepemimpinan, peranan kepemimpinan suatu bangsa adalah sangat menentukan. Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk sebuah

pembangunan diperlukan pemimpin – pemimpin informal yang memiliki legitimasi.

2. Komunikasi. Gagasan – gagasan kebijakan dan rencana hanya akan mendapat dukungan bila diketahui dan dimengerti. Hal – hal tersebut mencerminkan sebagian atau seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat. Kemudian diterima dengan pengertian masyarakat, bahwa hasil dari kebijakan rencana itu akan betul – betul dapat dipetik atau diterima oleh masyarakat.
3. Pendidikan. Tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran tinggi bagi warga negara, dengan memudahkan pengembangan identifikasi terhadap tujuan – tujuan pembangunan yang bersifat nasional. Kesadaran dan kemampuan untuk tumbuh sendiri dari masyarakat tergantung pada tersedianya kualitas pendidikan, baik formal maupun informal.

II.1.6 Hambatan dan Kendala Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Hambatan dan tantangan pertama dari optimalisasi partisipasi masyarakat adalah resistensi birokrasi dan politisi, yang selama ini menganggap kapasitas masyarakat dan perangkat pemerintahan basis masih sangat terbatas baik teknis maupun sikap atau perilaku berdemokrasi (Sumarto,2000). Sebagian besar birokrat masih keberatan apabila kewenangannya diserahkan, yang akan membawa konsekuensi berkurangnya anggaran dinas atau instansi yang dikuasainya. Selain itu, masih banyak peraturan birokrasi yang berorientasi “proyek”.

Beberapa langkah kemudian yang mungkin bisa dilakukan dengan melakukan desain ulang pada struktur lembaga publik, lewat paket

kebijakan dan pemerdayaan sumber daya manusia (Wachs,1987). Hal lanjutannya adalah agar pelaksanaan kegiatan partisipatif masyarakat tidak terdistorsi dan di manipulasi oleh kelompok tertentu, seperti elit desa dan elit basis lainnya. Karenanya pengembangan sistem/ mekanisme perumusan/ pengambilan kebijakan publik, termasuk resolusi konflik, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan modal sosial sangat mendesak dilakukan.

Beberapa hambatan lainnya yang menghambat partisipasi yang baik (Sumarto,2000) adalah:

- a) Hambatan struktural yang membuat iklim atau lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadinya partisipasi. Diantaranya adalah kurangnya kesadaran berbagai pihak akan pentingnya partisipasi serta kebijakan/aturan yang kurang mendukung partisipasi termasuk kebijakan desentralisasi fiskal.
- b) Hambatan internal masyarakat sendiri, diantaranya kurang inisiatif, tidak terorganisir dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terjadi antara lain akibat kurangnya informasi.
- c) Hambatan akibat kurang terkuasainya metode dan teknik-teknik partisipasi.

Lebih lanjut dari sisi masyarakat dan pemerintah keduanya mempunyai permasalahan masing-masing dalam meningkatkan kadar partisipasi (Dwiyanto, 2006). Dari sisi pemerintah kendala yang ada adalah:

- a) Lemahnya komitmen politik para pengambil keputusan.

- b) Lemahnya dukungan sumber daya manusia yang dapat diandalkan.
- c) Rendahnya kemampuan lembaga legislatif dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat.
- d) Lemahnya dukungan anggaran, tidak ada kesinambungan kegiatan.

Sementara hambatan dari sisi masyarakat adalah:

- a) Budaya paternalisme, takut bertindak beda.
- b) Apatisme, akibat masyarakat jarang diajak dalam proses kebijakan.
- c) Tidak adanya *trust* (kepercayaan) dari masyarakat.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terhadap berhasil atau gagalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh Conyers (dalam Ainur Rohman 2009 : 49) yaitu:

1. Hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak akan berpartisipasi atau kemauan sendiri atau antusias tinggi dalam kegiatan perencanaan kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan tersebut tidak mempunyai pengaruh pada rencana akhir.
2. Masyarakat enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak menarik minat mereka atau tidak mempunyai pengaruh langsung yang dapat mereka rasakan.

II.2 Konsep Pembangunan

II.2.1 Pengertian Pembangunan Daerah

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan

yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. Subandi (2011:9-11). Menurut Muluk (2009:94) Seluruh tahapan musrenbang yang telah terlaksana merupakan sebuah lembaga publik yang melibatkan banyak pihak di luar DPRD dan pemerintah daerah terkait dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Keluaran yang dihasilkan oleh lembaga merupakan masukan yang kemudian ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemerintahan daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dengan mempertimbangkan peran tersebut, musrenbang dapat ditempatkan dalam tangga ke enam partisipasi masyarakat, Muluk (2007 :245-274) yakni genuine consultation (konsultasi sejati) karena musrenbang merupakan forum bersama antara berbagai elemen masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan daerah namun tidak dapat ditempatkan dalam tangga ke tujuh (effective advisory bodies atau badan penasihat yang efektif) karena peran pemerintah daerah masih cukup besar dalam forum tersebut. Dalam setiap tingkatan musyawarah perencanaan pembangunan, pada dasarnya terdapat dua dokumen rencana yakni dokumen yang dihasilkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat pada tingkatan tersebut dan dokumen rencana dari perangkat daerah pada tingkatan tersebut.

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa meskipun musrenbang benar-benar mampu membawa aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan namun peran besar dalam proses tersebut tetap berada di tangan pemerintah daerah. Banyaknya usulan pembangunan masyarakat yang hilang disebabkan oleh adanya porsi rencana pembangunan yang bersifat kompleks dari pemkot dan terlalu banyaknya usulan masyarakat yang masuk sehingga harus dipilah dan dipilih berdasarkan kategori pembedangan dan prioritas atas dasar kategori tersebut. Hal ini harus dilakukan karena keterbatasan anggaran pemerintah kota untuk dapat memenuhi semua aspirasi masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami pula mengapa musrenbang dimasukkan dalam kategori tangga keenam genuine consultation dan bukannya pada tangga partisipasi yang lebih tinggi lagi. Selain itu, harus diakui bahwa mekanisme ini dapat melibatkan masyarakat dalam jumlah yang cukup besar dalam proses pembangunan sehingga mekanisme ini pantas ditempatkan dalam tangga partisipasi tersebut.

Dukungan langsung lainnya dari pemerintah pusat terhadap partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tampak dari pengaturan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran serta masyarakat dalam UU tersebut diatur dalam Bab VI tentang Peran Serta Masyarakat yang meliputi Pasal 8 dan 9. Pasal 8 intinya menyatakan adanya hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Sementara Pasal 9 mengatur bentuk-

bentuk partisipasi masyarakat berupa hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan Negara hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan Negara, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara serta hak memperoleh perlindungan hukum dan berperan serta dalam penyelenggaraan negara. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah terus menguat ketika partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah juga diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat, bahkan partisipasi masyarakat disebut sebanyak 4 kali dalam UU ini dan 2 kali penyebutan tentang "mengikutsertakan masyarakat." Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah ini dilakukan dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang

Dalam hal ini, *pembangunan* dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Nugroho dan Rochmin Dahuri (2004).

- 1) Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya.
- 2) Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum

yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil.

- 3) Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Berdasarkan konsep pembangunan yang dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah sebagai suatu proses yang dilakukan secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk mengubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, menyangkut semua aspek kehidupan, fisik-nonfisik, material-spiritual, meliputi bidang: ideologi, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya dan ketahanan masyarakat atau nasional suatu bangsa.

II.2.2 Pentingnya Partisipasi dalam Pembangunan

Menurut Conyers (1994:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak untuk turut

memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini selaras dengan konsep *mancentered development* (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia), yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.

II.2.3 Faktor- Faktor yang mempengaruhi Pembangunan

Sebagaimana layaknya suatu aktivitas yang terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan dan selalu bersifat dinamis, keberhasilan atau kegagalan program perencanaan pembangunan daerah selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tersebut secara khusus dapat berbeda tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang berlaku di daerah perencanaan.

Substansi permasalahan yang berbeda antara satu masalah dengan daerah lainnya dapat menyebabkan berbedanya faktor-faktor yang dimaksud. Adapun faktor-faktor pendukung program pembangunan daerah antara lain meliputi:

- a) Kestabilan politik dan keamanan dalam negeri
- b) Dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya
- c) Realistis, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan pendanaan
- d) Koordinasi yang baik
- e) Top down dan bottom up planning
- f) Sistem pemantauan dan pengawasan yang terus menerus
- g) Transparansi dan dapat diterima oleh masyarakat.

Namun secara umum, Riyadi dan Deddy Bratakusumah (2003:54) mengemukakan faktor-faktor pendukung tingkat keberhasilan program

pembangunan daerah dengan merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan yang antara lain meliputi:

- a) Faktor lingkungan Pertama adalah faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, yang dapat mencakup bidang sosial, budaya, dan politik. Lingkungan memiliki pengaruh yang kuat terhadap berhasil tidaknya program perencanaan pembangunan daerah. Faktor-faktor lingkungan tersebut dapat berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal).
- b) Faktor eksternal biasanya datang dari wilayah tetangga atau pengaruh global yang berkembang dalam lingkup nasional maupun internasional. Sedangkan faktor internal merupakan pengaruh yang datang dari dalam wilayah perencanaan sendiri.

Unsur-unsur yang berada dalam faktor lingkungan ini dapat dibagi menurut bidang:

- a. Sosial

Dalam konteks perencanaan sosial, School (1984) menyatakan bahwa "perencanaan sosial memiliki tujuan-tujuan sosial yang khas dalam suatu strategi pembangunan dimana masyarakat harus bisa menerimanya sebagai upaya untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan. Proses perencanaan pembangunan daerah tidaklah mudah, dan oleh karena itu memerlukan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak yang positif terhadap perencanaan pembangunan daerah. Sebaliknya, apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat

dikembangkan, proses pembangunan mungkin terhambat atau bahkan mengalami kegagalan.

b. Budaya

Pandangan tentang perlunya perhatian terhadap unsur budaya dalam proses pembangunan ditegaskan oleh Bintoro (1988: 61), yang mengemukakan tentang pentingnya memperhatikan masalah sosial budaya dalam proses pembangunan, yakni “proses pembangunan yang sebenarnya, haruslah merupakan perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju sendiri (self sustaining process) tergantung pada manusia dan struktur sosialnya.

c. Ekonomi

Keadaan ekonomi yang meningkat diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih mencapai tujuan-tujuan pembangunan di bidang lainnya, sehingga lebih mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Stabilitas ekonomi menjadi target ekonomi menjadi target utama yang harus diwujudkan melalui proses pembangunan, karena dengan adanya stabilitas ekonomi yang dinamis, proses pembangunan, akan berhasil dengan baik, walaupun hal itu tidak dapat dilepaskan dari adanya stabilitas di bidang lainnya. Dalam hubungan tersebut, Bintoro (1988: 59) mengemukakan, “gejolak-gejolak ekonomis yang besar (atau juga gejolak-gejolak politik, dll) paling sedikit kurang memungkinkan suatu perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang baik.”, Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

faktor ekonomi memiliki dampak yang sangat besar terhadap proses pembangunan, yang dalam hal ini juga sangat berdampak terhadap proses-proses awal pembangunan yakni perencanaan pembangunan.

d. Politik

Hubungan antara politik dan pembangunan dikemukakan oleh Bintoro (1988: 54) walaupun secara spesifik ia mengaitkannya dengan administrasi pembangunan.

e. Administrasi

Dalam kesempatan ini yang penting dikemukakan bahwa aspek tersebut juga memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya proses pembangunan, dan secara keseluruhan berpengaruh pula terhadap proses perencanaan. Siagian (1982: 116) secara tegas mengaitkan pentingnya administrasi dalam proses pembangunan dengan ungkapannya, “sebagian besar kegiatan pembangunan menyangkut masalah-masalah administratif, karenanya dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya proses pembangunan itu berlangsung sangat tergantung pada kemampuan administratifnya. Tanpa pembangunan administrasi (administrative development), administrasi pembangunan (development administrative) akan kacau balau.”

f. Faktor Sumber Daya Manusia

Kualitas perencanaan yang baik akan lebih memungkinkan tercipta oleh sumber daya manusia yang tepat dan berkualitas, sementara itu perencanaan yang baik juga lebih memungkinkan untuk dapat diimplementasikan dalam program-program pembangunan.

Adapun Riyadi (2003: 28) berpendapat enam pokok hal yang harus dimiliki oleh seorang perencana pembangunan daerah, yaitu:

- a. Mengenal wilayah perencanaan dengan berbagai permasalahannya (known well the planning area).
- b. Memahami adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat intersektoral, heterogen, dan bervariasi.
- c. Memadukan kepentingan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (interesting aggregation).
- d. Merumuskan rencana aksi (action plan) dari hasil perencanaannya (operational design).
- e. Melaksanakan rencana aksi tersebut (implementation).
- f. Melakukan evaluasi perencanaan (monitoring dan evaluation).
- g. Faktor sistem yang digunakan

Yang dimaksud dengan sistem perencanaan disini adalah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu sebagai dasar atau landasan pelaksanaan perencanaan pembangunannya. Friedman (dalam Kartasamita, 1997: 65) mengemukakan bahwa ada berbagai jenis perencanaan pembangunan yang terbagi menurut sudut pandang yang berbeda, seperti:

- a) Berdasarkan ruang lingkup tujuan dan sarannya, perencanaan pembangunan dapat terbagi menjadi perencanaan yang bersifat nasional, sektoral, dan spasial. Atau dapat juga bersifat agregatif atau komprehensif dan parsial.

- b) Berdasarkan jangkauan dan hierarkinya, dibagi menjadi perencanaan tingkat pusat dan daerah.
 - c) Berdasarkan jangka waktu, dibagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - d) Berdasarkan arus informasi/proses hierarki penyusunannya, dapat dibagi menjadi perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) dan perencanaan dari bawah ke atas (down top planning) atau kombinasi dari keduanya.
 - e) Berdasarkan segi ketepatan atau keluwesan proyeksi ke depannya perencanaan dapat bersifat indikatif atau preskriptif.
 - f) Berdasarkan sistem politiknya, dapat dibagi menjadi perencanaan bersifat alokatif, inovatif, dan radikal.
- h. Faktor perkembangan ilmu dan teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong, dan pembangunan yang berhasil akan mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Bintoro (1988: 67) mengatakan “ilmu dan teknologi dapat merupakan sumber yang penting dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan.”, Siagian (1995: 81) menyatakan, “jika orientasi para pengambil keputusan strategik semata-mata orientasi efisiensi, pemanfaatan teknologi akan cenderung semakin meluas dan meliputi semakin banyak segi dan proses organisasional. Akan tetapi kiranya para pengambil keputusan strategik harus menyadari pula bahwa dengan perkembangan teknologi yang secanggih apapun orientasi manusia tetap sangat penting karena

dengan kehadiran dan pemanfaatan teknologi yang paling canggih pun unsur manusia tetap paling penting.”

i. Faktor pendanaan

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal ini harus benar-benar diperhatikan sebagai suatu hal yang sangat penting. Perencanaan pembangunan daerah adalah kegiatan yang mahal. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar serius, dalam arti pihak-pihak yang terkait, termasuk para perencananya, harus tetap fokus pada tugasnya, punya komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai dan harus bekerja keras, teliti serta tidak terburu-buru dalam penyusunannya. Selain itu dalam perencanaan pembangunan daerah harus sudah diperhitungkan pendanaannya mulai dari berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan, sumber pendanaan, dan sistem pengelolaannya. Ini penting demi efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.

II.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dijadikan suatu bahan acuan atau referensi oleh peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperluas dan memepdalam teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Thn	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Skripsi	Relevansi	Perbedaan
1.	Nur Islamiah (2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sanglepongan yaitu dilihat keempat bidang partisipasi yaitu perencanaan, mencapai skor 41,0 persen atau berada pada kategori sedang, pelaksanaan mencapai skor 61,5 persen berada pada kategori tinggi, evaluasi/monitoring 52 persen berada pada kategori tinggi, dan pemanfaatan hasil 78,9 persen berada pada kategori tinggi. Skor partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Sanglepongan tergolong pada kategori sedang yang dibuktikan oleh skor gabungan bidang-bidang partisipasi rata-rata 58,350 persen.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar dalam Program Kontainer Recover Center pada Kebijakan Makassar Recover di Kecamatan Mamajang dapat dikatakan sangat kurang, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui fungsi dan kegunaan dari Konteinar Recover Center ini. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan konteiner recover center ini menunjukkan tidak berhasilnya program yang dijalankan.	Relevansi dari hasil peneitian terdahulu terlihat bahwa focus penelitian yang menggunakan tingkat partisipasi masyarakat sebagai kajian yang diteliti.	Perbedaan dari metode penelitian yang digunakan dari penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.
2.	Nismawati (2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar	Relevansi dari hasil penelitian terdahulu dengan hasil	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang

		<p>pembangunan infrastruktur jalan cukup baik, yakni terdapat dua hal yang mempengaruhi, pertama adanya kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dengan membebaskan lahannya. Kedua, pembangunan infrastruktur jalan di desa Anabanua dipengaruhi oleh faktor pendukung diantaranya dukungan dan sumbangan masyarakat serta faktor kemauan dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor penghambat karena rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat serta adanya dana desa.</p>	<p>dalam Program Kontainer Recover Center pada Kebijakan Makassar Recover di Kecamatan Mamajang dapat dikatakan sangat kurang, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui fungsi dan kegunaan dari Kontainer Recover Center ini. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan kontainer recover center ini menunjukkan tidak berhasilnya program yang dijalankan.</p>	<p>skripsi yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>dilakukan oleh peneliti yaitu pada teori yang digunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dari Sutami, sedangkan pada penelitian oleh peneliti menggunakan teori indikator partisipasi dari Burns, Hambleton dan Hogget.</p>
3.	Riskayanti (2021)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dalam bentuk: 1). partisipasi pikiran</p>	<p>Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar dalam Program Kontainer Recover Center pada Kebijakan Makassar Recover di Kecamatan Mamajang</p>	<p>Relevansi dari hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa focus penelitian yang menggunakan partisipasi masyarakat sebagai kajian yang diteliti.</p>	<p>Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian oleh peneliti yaitu pada teori yang digunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan teori bentuk-</p>

		<p>yaitu: a). Bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) dan b). Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), 2).partisipasi tenaga dalam bentuk kerja bakti dan gotong royong 3). partisipasi keahlian berupa keterampilan, 4). partisipasi barang berupa alat dan perkakas dan 5). partisipasi uang berupa iuran dana yang dilakukan oleh masyarakat di desa Romanglasa masih sangat minim dan masih banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut.</p>	<p>dapat dikatakan sangat kurang, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui fungsi dan kegunaan dari Konteinar Recover Center ini. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan konteiner recover center ini menunjukkan tidak berhasilnya program yang dijalankan.</p>		<p>bentuk partisipasi menurut Davis sedangkan pada penelitian oleh peneliti menggunakan teori indikator partisipasi dari Burns, Hambleton dan Hogget.</p>
4.	Hijriah (2015)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat tergantung kepada kualitas</p>	<p>Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar dalam Program Kontainer Recover Center pada Kebijakan</p>	<p>Relevansi dari hasil penelitian terdahulu dengan hasil skripsi yaitu sama-sama menggunakan metode</p>	<p>Perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian oleh peneliti menunjukkan bahwa perbedaan terdapat pada</p>

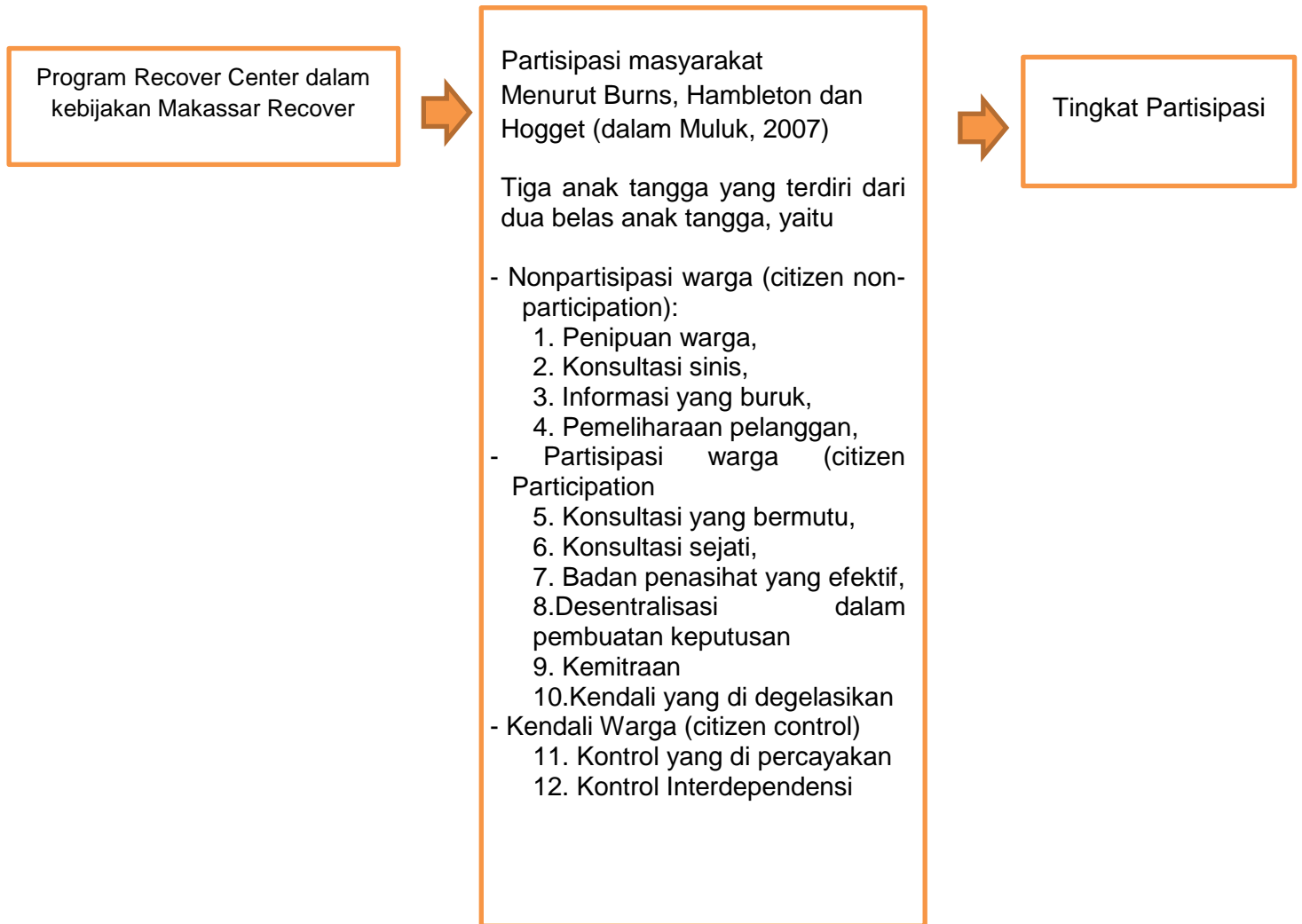
		<p>pengelolaan sampah di Desa Cadika. Secara umum pendapatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Cadika. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah ini diharapkan masyarakat untuk tetap memberi sosialisasi tentang program-program pengelolaan sampah yang ada seperti program pemilahan sampah organik dan anorganik, agar masyarakat juga termotivasi untuk tetap ikut dalam berpartisipasi.</p>	<p>Makassar Recover di Kecamatan Mamajang dapat dikatakan sangat kurang, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui fungsi dan kegunaan dari Konteinar Recover Center ini. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan konteiner recover center ini menunjukkan tidak berhasilnya program yang dijalankan.</p>	<p>penelitian kualitatif.</p>	<p>objek penelitian. pada penelitian terdahulu meneliti pengelolaan sampah sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti meneliti program Konteiner Recover Center.</p>
5.	Irmawati (2014)	<p>Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar 9 tahun di Kelurahan Panaikang dapat dilihat dari dua aspek : (1). Tingkat partisipasi nyata masyarakat masih kurang. Sedangkan dilihat dalam bentuk</p>	<p>Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar dalam Program Kontainer Recover Center pada Kebijakan Makassar Recover di Kecamatan Mamajang dapat dikatakan sangat kurang, hal ini dikarenakan</p>	<p>Hasil penelitian terdahulu dan hasil skripsi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih kurang dalam memanfaatkan program yang dijalankan pemerintah.</p>	<p>Perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian oleh peneliti menunjukkan bahwa perbedaan terdapat pada objek penelitian. pada penelitian terdahulu meneliti terkait program wajib belajar 9 tahun sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti</p>

		<p>tenaga dan keterampilan tingkat partisipasinya cukup meningkat. (2). Tingkat partisipasi tidak nyata masyarakat masih rendah Sementara itu, dalam pengambilan keputusan dan representatif juga masih rendah Kemudian Faktor-faktor yang mempengaruhi program wajib belajar sembilan tahun di Kelurahan Panaikang masih sangat rendah. Dapat dilihat dari aspek : (1). Pendidikan orang tua yang rendah. (2). Pendapatan orang tua yang tidak mencukupi. (3). Motivasi dari orang tua kepada anak yang kurang. (4). Status Sosial. (5). Percaya Diri. (6). Lingkungan.</p>	<p>kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui fungsi dan kegunaan dari Konteinar Recover Center ini. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan konteiner recover center ini menunjukkan tidak berhasilnya program yang dijalankan.</p>		<p>meneliti program Konteiner Recover Center.</p>
--	--	--	--	--	---

II.4 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran yang diambil dari suatu Teori yang dianggap relevan dengan Fokus /Judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada di rumusan masalah penelitian.

Adapun Teori yang di gunakan untuk mengetahui Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar dalam Program Kontainer Recover Center pada kebijakan Makassar recover adalah indikator Partisipasi menurut Burns, Hambleton dan Hogget (dalam Muluk, 2007:61-64), yaitu mengelompokkan tiga tingkat Partisipasi yang terdiri dari dua belas anak tangga, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan satu indicator dengan empat anak tangga berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi ini termasuk di Non partisipasi warga bahwa benar tidak adanya partisipasi warga, berikut anak tangga Non partisipasi warga beserta anak tangganya. untuk memperjelas kerangka ini, penulis menyajikannya dalam gambar berikut:



Gambar II.1 Kerangka Berpikir